

SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA ZAMAN PENJAJAHAN BELANDA DAN JEPANG

Wahdaniya

Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Author: Wahdaniya

E-mail: wahdaniya@unismuh.ac.id

Abstract

*This study aims to describe the historical development of Islamic education during the Dutch and Japanese colonial periods. It employs a qualitative approach, specifically utilizing library research. Data were gathered from relevant sources, including journals and literature. The findings indicate that during the Dutch colonial era, the religious activities of Muslims were strictly monitored and restricted. The Dutch established *presterraden* (priests' councils), a regulatory measure requiring anyone intending to provide religious instruction to obtain prior authorization. These restrictions on Islamic religious teachers were known as the "Guru Ordinance" (*Ordonansi Guru*). In contrast, during the Japanese colonial period, Islamic religious education was officially permitted in government schools. However, the Japanese government's more lenient policy toward Muslims did not imply that Japan was superior to the Netherlands; rather, the policy was a strategic move to win the favor and support of the Muslim community for Japan's war effort in the Greater East Asia War.*

Keywords: *Indonesian Islamic Education; Colonial Era; Development of Islamic Education*

Abstrak

*Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Sejarah perkembangan Pendidikan Islam pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka (library research). Data yang terkumpul diperoleh dari studi kepustakaan berupa jurnal, buku/literatur yang relevan dengan tulisan ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa pada zaman penjajahan Belanda aktivitas keagamaan umat Islam senantiasa diawasi dan dibatasi secara ketat. Belanda membentuk *presterraden*, yaitu ketentuan yang mengharuskan setiap orang yang akan memberikan pengajaran agama wajib minta izin terlebih dahulu. Aturan tentang pembatasan peran guru agama Islam tersebut dikenal dengan*

ordonansi guru, sedangkan pada masa penjajahan Jepang, pendidikan agama Islam secara resmi diizinkan diajarkan di sekolah-sekolah pemerintah. Longgarnya kebijakan pemerintah Jepang terhadap umat Islam tidak berarti Jepang lebih baik dibanding Belanda. Kebijakan tersebut diambil sebagai strategi Jepang untuk mengambil hati umat Islam agar memberi dukungan terhadap Jepang dalam perang Asia Timur Raya.

Kata Kunci: Pendidikan Islam Indonesia; Zaman Penjajahan; Perkembangan Pendidikan Islam

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya sejarah pendidikan Islam tidak terlepas dari sejarah Islam. Sumber utama ajaran Islam yaitu al-Qur'an mengandung banyak nilai-nilai kesejarahan yang langsung atau tidak langsung mengandung makna yang besar, pelajaran yang sangat tinggi, khususnya bagi umat Islam.

Tonggak sejarah pendidikan Islam mulai berlangsung sejak diangkatnya Nabi Muhammad saw. menjadi Nabi dan Rasul oleh Allah swt. yang ditandai dengan diterimanya wahyu pertama melalui malaikat Jibril di Gua Hira pada tahun 610 M, yaitu Q.S. al-Alaq/ 96:1-5.

Menurut Zuhairini, pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dibagi ke dalam lima periode, yaitu:

1. Periode pembinaan pendidikan Islam, yang berlangsung pada zaman Nabi Muhammad saw.
2. Periode pertumbuhan pendidikan Islam, yang berlangsung sejak Nabi Muhammad saw. Wafat sampai masa akhir Bani Umayyah yang diwarnai dengan berkembangnya ilmu naqliyah.
3. Periode kejayaan (puncak perkembangan) pendidikan Islam, yang berlangsung sejak permulaan daulah Abbasiyah sampai dengan jatuhnya Bagdad, yang diwarnai oleh berkembangnya ilmu akliyah dan timbulnya madrasah, serta memuncaknya perkembangan kebudayaan Islam.
4. Periode kemunduran pendidikan Islam, yaitu sejak jatuhnya Bagdad sampai jatuhnya Mesir ke tangan Napoleon, yang ditandai dengan runtuhnya sendi-sendi kebudayaan Islam dan berpindahnya pusat pengembangan kebudayaan ke dunia Barat.
5. Periode pembaruan pendidikan Islam, yang berlangsung sejak pendudukan Mesir oleh Napoleon sampai masa kini, yang ditandai dengan kebangkitan kembali umat dan kebudayaan Islam. (Zuhairini, dkk:2006).

Dengan mempelajari kehidupan masa lalu umat Islam akan membantu memahami sebab-sebab kemajuan dan kemunduran pendidikan Islam. Pemahaman tersebut dapat dijadikan pijakan dalam mengembangkan kesalahan-kesalahan pada masa lalu. Oleh karena itu, untuk mencapai kemajuan pendidikan Islam sekarang dan memecahkan persoalan-persoalan pendidikan Islam harus mendalami historical Islam, khususnya yang menyangkut dengan dunia pendidikan Islam. (Suwito dan Fauzan, 2005:77).

Pendidikan Islam merupakan salah satu bentuk manifestasi dari cita-cita Islam yang bisa melestarikan, mengalihkan, menanamkan dan mentransformasikan nilai Islam kepada generasi penerusnya sehingga nilai kultural religius yang dicita-citakan dapat tetap berfungsi dan berkembang dalam masyarakat dari waktu ke waktu, (M. Arifin, 2011:8).

Berbicara tentang pendidikan Islam di Indonesia, sangatlah erat hubungannya dengan kedatangan Islam itu sendiri ke Indonesia. Dalam hal ini Mahmud Yunus mengatakan bahwa sejarah pendidikan Islam sama tuanya dengan masuknya Islam ke Indonesia (Samsul Nizar, 2011: 341).

Napak tilas perjalanan panjang pendidikan Islam di Indonesia menjadi sebuah kajian menarik dan sangat relevan dengan kemajuan lembaga-lembaga pendidikan Islam saat ini. Sejarah mencatat bahwa Islam telah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 M dan baru beberapa tahun kemudiannya berkembang yaitu kira-kira pada abad ke-13 M. Meluasnya Islam ditandai dengan berdirinya kerajaan Islam yang tertua di Indonesia, seperti kerajaan Peurlak dan Samudera Pasai di Aceh pada tahun 1292 M dan tahun 1297 M. Perkembangan dan penyebaran Islam saat itu melalui zona perdagangan di daerah pantai Sumatera dan melalui urat nadi perdagangan di Malaka, agama Islam kemudian menyebar ke pulau Jawa dan seterusnya ke Indonesia bagian Timur, perluasan Islam ketika itu suasananya dalam keadaan perang, namun menariknya, Islam masuk ke Indonesia melalui peralihan agama Hindu dan masuknya Islam ke Indonesia melalui jalan damai (Supriatun, 2023:100).

Saat Pendidikan Islam dalam tahap perkembangan, justru dihadapkan pada kondisi sosial politik yang tidak kondusif, sehingga perkembangannya terhambat. Sejak abad ke-16 bangsa Indonesia secara terus-menerus mengalami penjajahan yang dimulai oleh bangsa Portugis, Inggris, Belanda dan Jepang. Penjajahan yang berkepanjangan menyebabkan bangsa Indonesia tidak mampu membangun system Pendidikan yang memadai, sehingga masyarakat mengalami keterbelakangan pendidikan. Pada zaman penjajahan kebijakan politik merupakan suatu instrument yang digunakan untuk melestarikan kolonialisme. Kebijakan dalam bidang pendidikan yang terbit pada zaman penjajahan diorientasikan untuk mendukung kepentingan penjajahan. Sedangkan pada zaman kemerdekaan Pendidikan diupayakan

sebagai instrument untuk mencerdaskan, mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki sejarah panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi sosial, politik, dan budaya. Pada masa penjajahan, baik oleh Belanda maupun Jepang, pendidikan Islam menghadapi tantangan yang signifikan. Penjajahan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan politik, tetapi juga pada sistem pendidikan yang ada pada waktu itu. Penjajahan Belanda yang berlangsung selama lebih dari tiga abad membawa banyak perubahan dalam struktur sosial dan pendidikan masyarakat Indonesia. Kebijakan pemerintah kolonial yang cenderung diskriminatif terhadap umat Islam mengakibatkan terbatasnya akses terhadap pendidikan formal bagi masyarakat Muslim. Madrasah dan pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, berjuang untuk tetap eksis di tengah tekanan dan pengawasan ketat dari pemerintah. Kebijakan seperti ordonansi sekolah liar dan pengawasan melalui priesteraden menunjukkan upaya Belanda untuk mengontrol pendidikan agama dan mencegah penyebaran ide-ide yang dapat menggugat kekuasaan kolonial. Setelah Belanda, Jepang mengambil alih kekuasaan di Indonesia pada tahun 1942 hingga 1945. Meskipun Jepang menerapkan kebijakan yang lebih lunak dibandingkan Belanda dalam beberapa aspek, mereka tetap menerapkan kontrol terhadap Pendidikan (Fitriani, dkk. 2024:776).

Mencermati latar belakang tersebut diatas, dalam tulisan ini akan mengkaji tentang sejarah perkembangan pendidikan Islam zaman penjajahan Belanda dan Jepang.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka (*library research*), yaitu studi kepustakaan dari berbagai referensi yang relevan dengan pokok pembahasan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data yang terkumpul diperoleh dari studi kepustakaan, laporan penelitian, buku-buku, literatur, serta sumber lain yang relevan dengan tulisan ini.

Teknik pengolahan dan analisis data dalam penulisan ini, yaitu dengan menggunakan: (a). Reduksi data, yaitu kegiatan pemilihan, penyederhanaan, pemusatan perhatian dari data mentah yang telah diperoleh. Data yang telah diperoleh kemudian dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, menajamkan, menggolongkan, serta memilih data yang dianggap relevan dan penting yang berkaitan dengan penguatan nilai-nilai karakter berbasis pendidikan Islam di era digital. (b). Display atau penyajian data.

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Bentuk penyajiannya adalah teks naratif (pengungkapan secara tertulis). Tujuannya supaya data terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan sehingga mudah dipahami, baik oleh penulis maupun orang lain (c). Kesimpulan dan verifikasi. Data yang sudah dipolakan, difokuskan dan disusun secara sistematis dalam bentuk naratif, maka melalui metode induksi data tersebut disimpulkan, Pada intinya, data yang diperoleh dalam penelitian ini diperlakukan dengan cara ditelaah dan dipilah, dalam hal ini hanya data penting dan relevan yang dirangkum. Pengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen, teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan membaca, mengkaji, dan menganalisis serta membaca catatan dari buku literatur, dokumen dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendidikan Islam Pada Zaman Penjajahan Belanda

Masuknya imperialisme Belanda ke Indonesia telah dimulai pada tahun 1595 pada saat Cornelis De Houtman memimpin armada yang terdiri dari empat buah kapal menuju nusantara. Awalnya, tujuan kedatangan Belanda ke Indonesia adalah untuk berdagang rempah-rempah. Dari segi ekonomi, kepulauan nusantara sangat menjanjikan karena berlimpahnya bahan rempah-rempah menyebabkan pemerintah imperialisme mendirikan kongsi dagang atau perusahaan Hindia Timur Belanda bernama VOC, pada 20 Maret 1602 yang bermarkas di Batavia (sekarang Jakarta). Tujuan utama VOC mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara (Pulungan, 2018:500).

Pada pergantian abad ke-18 M secara resmi Indonesia pindah ketangan pemerintah Belanda sampai tahun 1942. Saat itu Belanda memanfaatkan daerah jajahan untuk memberi keuntungan sebanyak-banyaknya kepada negeri induknya guna menanggulangi masalah ekonomi Belanda yang sedang mengalami kebangkrutan akibat perang. Penjajah Belanda secara sistematis memonopoli perdagangan dan mendundukkan penguasa-penguasa local serta merampas daerah-daerah tersebut kedalam kekuasaannya dengan berbagai taktik politik yang dijalankan, di antaranya politik liberal, politik etis, politik balas budi dan politik adu domba.

Selama masa penjajahan Belanda, aktivitas keagamaan umat Islam senantiasa diawasi dan dibatasi secara ketat. kebijakan kolonial dalam bidang pendidikan tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan politik kolonial Belanda yang membawa misi kristenisasi. Oleh karena itu pembelajaran Pendidikan

Agama Islam dianggap tidak sejalan dengan misi kolonialisme. Bahkan perkembangan agama Islam dapat menjadi ancaman bagi kaum penjajah (Said dan Affan, 1987:56).

Pemerintah Belanda memberikan perlakuan diskriminatif terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Di antara pelaksanaan diskriminatif adalah pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus untuk mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam. Dualistik diskriminatif, yaitu membedakan bahasa pengantar pendidikan untuk orang-orang Belanda (berbahasa Belanda) dengan pendidikan untuk orang-orang bumiputra (berbahasa Melayu). Sentralistik, yaitu pendidikan itu secara keseluruhan diatur dan ditentukan orang Belanda. Tujuan Pendidikan bagi bumiputra, yaitu menghasilkan tamatan yang dapat menjadi warganegara Belanda kelas dua yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pegawai negeri atau pegawai perusahaan swasta Belanda. Diberlakukan ordonansi guru pada tahun 1905. Ordonansi itu adalah mewajibkan setiap guru agama Islam untuk meminta dan memperoleh izin terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugas sebagai guru agama. Ordonansi ini dirasakan oleh para guru agama sangat berat, terlebih bagi guru agama yang belum memiliki administrasi sekolah (Ilham, dkk. 2022:106).

Aturan pembatasan guru agama Islam terdapat dalam peraturan pemerintah tahun 1905 M yang dikeluarkan atas nasihat badan tersebut. Akibat dari peraturan ini, sangat berdampak buruk bagi perkembangan pendidikan agama Islam. Akan tetapi disisi lain, aturan-aturan tersebut justru membangkitkan semangat para tokoh Islam yang dipelopori oleh para ulama yang pulang menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu di Mekkah. Kebangkitan Islam dimulai pada tahun 1900 M dengan berdirinya sekolah-sekolah swasta dan organisasi sosial keagamaan (Yunus, 1996:228).

Gerakan pembaharuan yang lahir di Timur Tengah telah memberikan pengaruh besar kepada gerakan kebangkitan Islam di Indonesia. Bermula dari pembaruan dan pendidikan Islam di Minangkabau, yang disusul oleh pembaruan pendidikan yang dilakukan masyarakat Arab di Indonesia. Kebangkitan Islam semakin berkembang dengan membentuk organisasi-organisasi sosial keagamaan, seperti Sarekat Dagang Islam di Bogor (1909 M), Persyarikatan Ulama di Majalengka Jawa Barat (1911), Muhammadiyah di Yogyakarta (1912 M), Persatuan Islam di Bandung (1920 M), Nahdatul Ulama di Surabaya (1926 M), Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Bukit Tinggi (1930 M), (Yatim, 2010:258).

Sementara itu, hampir pada waktu yang bersamaan, pemerintahan penjajah menjalankan politik etis, politik balas budi. Belanda mendirikan sekolah-sekolah formal bagi bumi putra. Terutama dari kalangan priyayi dan kaum bangsawan. Pendidikan Belanda tersebut membuka mata kaum

terpelajar akan kondisi masyarakat Indonesia. Pengetahuan mereka akan kemiskinan, kebodohan dan ketertindasan masyarakat Indonesia, pada saatnya mendorong organisasi seperti Budi Utomo, Taman siswa, Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Selebes, dan lain-lain.

Setelah Gerakan nasionalisme dan Islamisme dicetuskan yang dipelopori oleh angkatan muda pada tahun 1928 M, pemerintah colonial Belanda semakin khawatir dan segera mengeluarkan peraturan yang mempersempit gerakan pendidikan agama Islam, antara lain membuat sebuah kebijakan yang disebut ordonansi sekolah liar. Pemerintah kolonial Belanda membatasi juga aktivitas keagamaan dengan menerbitkan larangan terhadap upacara keagamaan yang dilaksanakan secara terbuka. Demikian juga umat Islam yang akan menuaikan ibadah haji dibatasi dan diawasi secara ketat karena dikhawatirkan akan membangkitkan semangat perlawanan umat Islam terhadap kolonial Belanda (Asrohah, 1999:151).

Meskipun kolonial Belanda senantiasa menekan dan membatasi gerakan dan aktivitas umat Islam dengan berbagai siasat dan cara, akan tetapi semangat nasionalisme bangsa Indonesia khususnya umat Islam justeru terus tumbuh dan bergelora. Pada saat kolonial Belanda melancarkan politik etis terutama di Jawa pada permulaan abad ke 20 ternyata tidak dapat mempengaruhi sikap dan pendirian para tokoh muslim untuk terus berjuang melawan penjajahan. Sebaliknya politik yang dijalankan kolonial Belanda melahirkan kesadaran para tokoh umat Islam akan ketidakadilan dan ketertindasan yang dialami masyarakat Indonesia. Adanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh kolonial Belanda mengakibatkan terhambatnya perkembangan pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah. Akibat langsung bagi pendidikan Islam, baik sebagai institusi maupun sebagai mata pelajaran di sekolah selalu gagal menjadi bagian dari sistem pendidikan kolonial. Di sisi lain, keterbatasan dan kesempitan memperoleh pendidikan bagi rakyat secara luas telah menyebabkan rakyat Indonesia khususnya umat Islam terbelakang. Kondisi ini secara politis, psikologis, maupun sosial sengaja dibuat secara sistematis oleh Belanda untuk mempertahankan kolonialisme. Pada dasarnya rakyat yang terbelakang secara pendidikan, politik, ekonomi mudah dikuasai dan tunduk pada keinginan kaum penjajah.

2. Pendidikan Islam Pada Zaman Penjajahan Jepang

Pergantian kekuasaan dari pemerintahan kolonial Belanda kepada pemerintahan pendudukan Jepang turut mempengaruhi wajah pendidikan nusantara. Pemerintahan Jepang yang menjajah lebih pendek, sekitar 3.5 tahun, meninggalkan jejak pendidikan yang berbeda dengan pemerintahan kolonial Belanda yang berkuasa di Nusantara sekitar 350 tahun. Dinamika pendidikan Islam pada masa pendudukan Jepang di Indonesia berbeda dengan

sistem pendidikan Islam pada masa pendudukan belanda. Jepang tampak sedikit lebih lunak dibanding pemerintah penjajah Belanda. Jepang, awalnya memberi prioritas umat Islam di Indonesia untuk mengembangkan pendidikan Islam utamanya syiar Islam, hal itu merupakan siasat yang dijalankan Jepang untuk kepentingan Perang Dunia II terbukti setelah Jepang mendapat tekanan dari sekutu justru Jepang memperlihatkan dirinya sebagai penjajah yang lebih kejam dari belanda. Rakyat dipaksa untuk bergabung dengan badan pertahanan Jepang sehingga pendidikan rakyat terbengkalai (Kamalasari, dkk. 2024:132).

Menurut catatan sejarah secara resmi Jepang telah menguasai Indonesia sejak 8 Maret 1942 ketika panglima tertinggi pemerintah kolonial Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Bandung. Jepang alias Dai Nippon memang awalnya memposisikan sebagai saudara tua bagi Indonesia dengan mengusung semangat 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Ternyata kedatangan Jepang ke Indonesia tidak berbeda dengan Belanda, sama-sama bangsa penjajah yang memberikan banyak kerugian terhadap rakyat Indonesia. Jepang bahkan memanfaatkan sumber daya Indonesia untuk membiayai perang mereka melawan Sekutu. Selama kurang lebih 3,5 tahun menguasai wilayah Indonesia, pendudukan pemerintahan militer Jepang menyebabkan munculnya banyak dampak di berbagai bidang yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Mulai dari sosial, ekonomi, budaya, militer, hingga pendidikan.

Jepang melakukan upaya-upaya dan siasat yang seolah-olah membantu kepentingan ummat Islam. Adapun siasat yang dilakukan oleh Jepang antara lain: kantor urusan agama yang pada masa penjajahan Belanda oleh orientalis Belanda, pada zaman Jepang kepemimpinan kantor tersebut diserahkan kepada ummat Islam. Pondok-pondok pesantren yang besar mendapat bantuan dari pemerintah Jepang, sekolah-sekolah negeri diberi pelajaran budi pekerti yang isinya mirip dengan pelajaran agama Islam. Bahkan pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta. Kebijakan-kebijakan dan upaya-upaya tersebut bukanlah untuk kemajuan bangsa dan rakyat Indonesia, melainkan merupakan siasat dan taktik Jepang agar kekuatan ummat Islam dapat menyokong kepentingan kolonial Jepang (Zuahirini, :152)

Ramayulis menyimpulkan bahwa, meskipun dunia pendidikan secara umum terbengkalai, karena murid-muridnya sekolah setiap hari hanya disuruh gerak badan, baris-berbaris, kerja bakti (*romusha*), bernyayi dan sebagainya. Yang agak beruntung adalah madrasah-madrasah yang ada di dalam lingkungan pondok pesantren yang bebas dari pengawasan langsung pemerintah pendudukan Jepang. Pendidikan dalam pondok pesantren masih dapat berjalan secara wajar (Fitriani, dkk. 2024:779).

Kebijakan-kebijakan penjajahan Jepang yang berkaitan dengan hubungan pemerintah umat Islam hampir sama dengan penjajahan Belanda yaitu adanya pembatasan-pembatasan. Perbedaannya, Pendidikan agama Islam yang pada masa Belanda senantiasa dibatasi bahkan dilarang diajarkan di sekolah pemerintah, sedangkan pada masa Jepang Pendidikan agama Islam secara resmi dibolehkan diajarkan di sekolah-sekolah pemerintah. Longgarnya kebijakan pemerintah Jepang terhadap umat Islam tidak berarti Jepang lebih baik dibanding Belanda. Kebijakan tersebut diambil sebagai strategi Jepang untuk mengambil hati umat Islam agar memberi dukungan terhadap Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Di samping itu, kesediaan Jepang memberi izin pendirian sejumlah organisasi umat Islam dimaksudkan agar Jepang lebih mudah melakukan kontrol terhadap aktivitas umat Islam.

PENUTUP

Pada zaman penjajahan Belanda aktivitas keagamaan umat Islam senantiasa diawasi dan dibatasi secara ketat. Pembatasan secara sistematis terhadap perkembangan pendidikan agama Islam terus diupayakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1882, pemerintah Belanda membentuk *presterraden*, yaitu sebuah badan yang diberi tugas khusus oleh pemerintah kolonial dalam mengeluarkan kebijakan. Diantara kebijakan yang dibuat yaitu ketentuan yang mengharuskan setiap orang yang akan memberikan pengajaran agama wajib minta izin terlebih dahulu. Aturan tentang pembatasan peran guru agama Islam tersebut dikenal dengan *ordonansi guru*.

Pada masa penjajahan Jepang, Pendidikan agama Islam yang pada masa Belanda senantiasa dibatasi bahkan dilarang diajarkan di sekolah pemerintah, sedangkan pada masa Jepang Pendidikan agama Islam secara resmi dibolehkan diajarkan di sekolah-sekolah pemerintah. Longgarnya kebijakan pemerintah Jepang terhadap umat Islam tidak berarti Jepang lebih baik dibanding Belanda. Kebijakan tersebut diambil sebagai strategi Jepang untuk mengambil hati umat Islam agar memberi dukungan terhadap Jepang dalam perang Asia Timur Raya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, H.M. (2011) Ilmu Pendidikan Islam, Tinjauan teoretis dan Praktis Berdsasarkan Pendekatan Interdisipliner, Cet. V. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Asrohah. (1999). Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta, PT.Logos, Wacana Ilmu.
- Azra, Azyumardi & Umam, Saiful. (1998). Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial Politik, Jakarta, PPIM
- Fitriani, Rama, B., Rusmin, M.B. (2024). Pendidikan Islam Pada Masa Penjajahan Belanda dan Jepang, Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Volume 2, Nomor 10.
- Ilham, Rama, B., Rasyid, M.R. Pendidikan Islam Indonesia Zaman Penjajahan, PIJAR: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Vol.1, No 1.
- Kamalasari, D., Zalnur, M., Masyhudi, F. (2024). Kebijakan Politik Kolonial Belanda dan Jepang Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia, Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, Volume 2 Nomor 4.
- Nizar, Samsul. (2011). Sejarah Pendidikan Islam, Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia, (Cet. IV; Jakarta: Kencana.
- Pulungan, Suyuti. (2018). Sejarah Peradaban Islam, Jakarta, Cet.1, Amzah.
- Said, M. dan Affan, J. (1987). Mendidik Dari Zaman Ke Zaman, Bandung, Jemmars
- Supriatun (2023). Dinamika Pendidikan Islam Pada Masa Penjajahan Jurnal Edukatif, Vol 1. No 2.
- Suwito dan Fauzan. (2005). Sejarah Sosial Pendidikan Islam (Ed.I. Cet.I; Jakarta: Kencana.
- Yatim, Badri. (2010) Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II, Cet.22, Rajawali Pers, Jakarta,
- Yunus, Mahmud. (1996). Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta Hidakarya Agung
- Zuhairini. (2011). Sejarah Pendidikan Islam. Bumi Aksara Kerjasama Ditjen Binbaga Islam R.I.

Link

<https://tirto.id/sejarah-dampak-pendudukan-jepang-di-indonesia-dalam-berbagai-bidang-glzh>